



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlu diselenggarakan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan tertib administrasi;
 - b. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan penyempurnaan pedoman penyusunan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 12);
7. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG TATA NASKAH DINAS.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran K Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 56) terkait Kop Naskah Dinas diubah sebagai berikut:

1. Perubahan Kop Naskah Dinas untuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal diubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Penambahan Kop Naskah Dinas karena terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru pada Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) yaitu Balai Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofis;
3. Penambahan Kop Naskah Dinas karena terbentuknya Unit Pelaksana Teknis (UPT) baru pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk yaitu Balai Perlindungan Perempuan dan Anak,

sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 April 2023

Pj SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

WIYOS SANTOSO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 16

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 70 TAHUN 2019 TENTANG
TATA NASKAH DINAS

K. KOP NASKAH DINAS

4. KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦂꦢꦒꦼꦂꦩꦼꦠꦼꦮꦪꦏꦂꦠꦏ
ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦤꦤꦩꦺꦴꦩꦤ꧀ꦠꦼꦢꦸꦱꦠꦸꦥꦶꦤꦠ

Alamat.....telepon.....faksimile.....
Website:

5. KOP NASKAH DINAS UPT



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS KEBUDAYAAN
BALAI PENGELOLAAN KAWASAN SUMBU FILOSOFIS
ꦠꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦂꦢꦒꦼꦂꦩꦼꦠꦼꦮꦪꦏꦂꦠꦏ
ꦠꦤ꧀ꦏꦺꦧꦸꦢꦂꦪꦤ꧀
ꦠꦺꦛꦶꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦭꦤ꧀ꦏꦪꦱꦤ꧀ꦱꦸꦩꦧꦸꦥꦶꦭꦺꦱꦺꦱꦶ

Alamattelepon.....faksimile.....
Website :



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, DAN
PENGENDALIAN PENDUDUK**
BALAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
ꦠꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦗꦼꦂꦢꦒꦼꦂꦩꦼꦠꦼꦮꦪꦏꦂꦠꦏ
ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦩꦼꦂꦸꦗꦼꦂꦧꦼꦩꦼꦂꦸꦗꦼꦂꦥꦼꦂꦺꦩꦸꦤ꧀ꦥ
ꦥꦺꦂꦺꦭꦤꦸꦁꦤ꧀ꦲꦤꦏ꧀ꦠꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦤꦠꦺꦭꦤ꧀ꦥꦺꦤꦸꦢꦸꦏ

Alamattelepon.....faksimile.....
Website:

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

HAMENGKU BUWONO X

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO
NIP. 19720711 199703 1 006